



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

DKI Genjot Penambahan Ruang Terbuka Hijau

Pemerintah akan gencar menagih tunggakan fasilitas sosial dan fsilitas umum dari para pengembang.

Gangsar Parikesit

gangsar@tempo.co.id

JAKARTA — Dinas Kehutanan DKI Jakarta akan menggenjot penambahan ruang terbuka hijau (RTH) pada tahun depan. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah menagih tunggakan fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) dari para pengembang. “Jadi, kami coba membangun (RTH) dari tanah fasos-fasum,” ujar Kepala Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, kemarin.

Berdasarkan data Dinas Kehutanan, luas ruang terbuka hijau di Ibu Kota pada 2015 baru mencapai 9,97 persen. Rinciannya, 6,90 persen merupakan RTH publik dan 3,07 persen RTH perorangan. Padahal Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2030 mengamanatkan ruang terbuka hijau harus mencapai 30 persen dari luas wilayah Jakarta.

Permasalahan fasos dan fasum juga pernah menjadi catatan Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan DKI 2016. Dalam audit itu, total tunggakan fasos dan fasum pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah (SIPPT) di seluruh Jakarta mencapai 1.761 hektare. Salah satu fasos dan fasum yang belum tertagih itu merupakan ruang terbuka hijau.

Adapun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 menyebutkan Dinas Kehutanan mengusulkan anggaran pengadaan tanah untuk RTH sebesar Rp 1,77

triliun. Jumlah tersebut naik dibanding anggaran untuk program serupa pada tahun ini yang sebesar Rp 1,67 triliun.

Menurut Suzi, penambahan ruang terbuka hijau dari tunggakan fasos-fasum perlu ketelitian. “Kami harus lihat juga administrasi serah-terima (fasos-fasum) di BPAD (Badan Pengelola Aset Daerah),” ujarnya.

Cara lain untuk menambah RTH, kata Susi, ialah meminta gedung swasta yang berada di jalan protokol membangun *vertical garden* dan *roof garden*. Dia optimistis pihak swasta bisa dilibatkan dalam program ini karena sejumlah perkantoran di Ibu Kota memiliki konsep ramah lingkungan.

Penambahan RTH dengan *vertical garden*, Susi melanjutkan, juga bisa diterapkan di permukiman penduduk. Dinas Kehutanan dapat bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Kelautan Pertanian untuk menerapkan *vertical garden* di kampung-kampung.

Selain itu, kata Susi, penambahan ruang terbuka hijau ini akan melibatkan pemerintah pusat, misalnya dengan menjadikan kolong jalan

tol dan kolong jalur *light rail transit* (LRT) menjadi RTH. “Jadi, ada kolaborasi dengan pemerintah pusat dan masyarakat,” ucapnya.

Pengamat tata kota dari Pusat Studi Perkotaan, Nirwono Joga, ragu pemerintah DKI dapat menambah ruang terbuka hijau dengan menagih tunggakan fasos-fasum dari pengembang. Apalagi sebagian pengembang sudah membayar kewajiban itu dalam bentuk uang. “Masalahnya, uang (yang diterima dari pengembang) itu enggak dibelikan lahan RTH oleh DKI,” ujarnya.

Selain itu, kata Nirwono, pemerintah tidak bisa lagi menagih lahan fasos dan fasum karena banyak perusahaan pengembang yang telah bubar. Walhasil, upaya pemerintah DKI menggenjot penambahan RTH sulit dipenuhi.

Adapun program *vertical garden* dan *roof garden* di gedung dan permukiman, menurut Nirwono, tidak dapat dihitung sebagai RTH. Sebab, *vertical garden* dan *roof garden* tidak bisa menyerap air. Sementara fungsi utama RTH justru harus dapat menyerap air. “*Vertical garden* dan *roof garden* tidak bisa meminimalkan banjir,” kata dia. ●

Anggaran Pengadaan Lahan

Dinas Kehutanan DKI Jakarta tetap memiliki program pengadaan tanah pada tahun depan untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH). Dinas menargetkan penambahan RTH mencapai 23 hektare pada tahun depan melalui pembelian lahan.

Berikut ini alokasi anggaran untuk menambah ruang terbuka hijau.

2020

Nomor	Kategori	Alokasi Anggaran	Proyeksi
1	Taman	Rp 1,008 triliun	12,5 hektare
2	Makam	Rp 166,24 miliar	3 hektare
3	Hutan Kota	Rp 604,8 miliar	7,5 hektare
Total		Rp 1,77 triliun	23 hektare

2019

Nomor	Kategori	Alokasi Anggaran
1	Taman	Rp 1,12 triliun
2	Makam	Rp 250 miliar
3	Hutan kota	Rp 304,8 miliar
Total		Rp 1,67 triliun